

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan menjadi salah satu hal yang penting dalam kemajuan suatu daerah dan kesejahteraan masyarakatnya (Dewi & Cahyono, 2016). Pembangunan daerah merupakan perwujudan penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah dan pelaksanaannya sebagai bagian integral dari pembangunan nasional (Chengsen Sipahutar *et al.*, 2018). Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari prinsip otonomi daerah (Ramadani, 2016). Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 adalah melibatkan masyarakat untuk bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan, serta merancang program pengembangan sosial dan ekonomi di tingkat lokal sehingga dapat lebih efektif.

Program pengembangan sosial dan ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemekaran Daerah. Pemekaran Daerah merupakan sarana atau pendekatan untuk mempercepat pembangunan daerah (Muhammad, 2020). Pemekaran daerah merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan kesatuan wilayah administratif baru di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota hasil pemekaran dari kabupaten induknya (Bakar *et al.*, 2018). Sehingga tujuan dan manfaat dilakukannya pemekaran daerah adalah untuk kesejahteraan masyarakat, mengatasi

ketimpangan pembangunan, dan menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi.

Sejak adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemekaran Daerah, sebanyak 31 dari 33 provinsi di Indonesia melakukan pemekaran daerah dan salah satunya adalah Provinsi Jambi. Provinsi Jambi yang awalnya hanya 5 Kabupaten yaitu Kerinci, Batanghari, Sarolangun Bangko, Tanjung Jabung, dan Bungo Tebo. Kemudian pada tahun 1999 Provinsi Jambi terjadi pemekaran daerah, sebanyak 5 kabupaten/kota. Sehingga total kabupaten/kota sebelum dan setelah pemekaran yaitu 10 kabupaten/kota yang terdiri dari 9 kabupaten dan 1 kota. Adapun daerah induk pemekaran dan hasil pemekaran Kabupaten/Kota Provinsi Jambi yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Hasil Pemekaran Kabupaten/Kota Provinsi Jambi

No	Daerah Induk Pemekaran	Hasil Pemekaran	Tahun Pemekaran
1	Kabupaten Batanghari	Kabupaten Muaro Jambi	1999
2	Kabupaten Sarolangun Bangko	Kabupaten Sarolangun	1999
3	Kabupaten Tanjung Jabung	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1999
4	Kabupaten Bungo Tebo	Kabupaten Tebo	1999
5	Kabupaten Kerinci	Kota Sungai Penuh	2008

Sumber : BPS Provinsi Jambi, diolah

Salah satu alasan dilakukannya pemekaran daerah kabupaten/kota ini karena terjadinya ketimpangan pembangunan sarana dan prasarana yang masih belum merata seperti jalan raya yang rusak. Minimnya fasilitas

kesehatan dan pendidikan daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Ketimpangan pembangunan merupakan fenomena yang terjadi di berbagai bidang perekonomian daerah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan rasio penduduk dan sumber daya alam di setiap daerah (Sjafrizal, 2014). Daerah memiliki kapasitas yang berbeda untuk mendorong proses pembangunan ekonomi. Setiap daerah memiliki daerah yang maju dan daerah yang tertinggal (Fahrizal *et al.*, 2019).

Perbedaan kapasitas yang berbeda pada suatu daerah untuk mendorong proses pembangunan ekonomi dapat mengakibatkan terjadinya ketimpangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah yaitu perbedaan sumber daya alam, faktor demografis, termasuk kondisi tenaga kerja, distribusi dana pembangunan antar daerah, termasuk investasi publik dan swasta, pemusatan kegiatan ekonomi lokal, dan likuiditas barang dan jasa (Sjafrizal, 2012). Ketimpangan pengeluaran suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan indeks gini (*gini ratio*), nilai gini rasio bervariasi antara 0 dan 1. Nilai gini rasio yang mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Sebaliknya semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin merata atau mendekati pemerataan sempurna.

Berdasar data BPS (2022) data gini rasio pada Pulau Sumatera yaitu berdasarkan nilai ketimpangan pembangunan adalah Provinsi Jambi berada pada urutan ke 1 dari 10 provinsi di Sumatera, dan berada di urutan ke 17 dari 34 provinsi di Indonesia dengan angka gini rasio sebesar 0,335.

Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan pada Provinsi Jambi masih tinggi karena pembangunan sarana dan prasarana yang belum merata secara keseluruhan baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

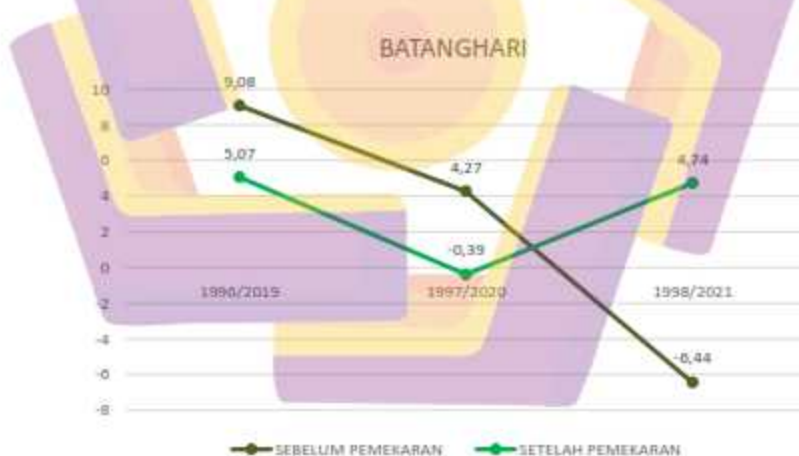
Ketimpangan pembangunan daerah tidak dapat dihilangkan, namun dengan adanya ketimpangan memberikan dorongan bagi daerah tertinggal untuk berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh dari daerah tetangga. Dampak negatif ketimpangan pembangunan adalah terjadinya inefisiensi ekonomi, melemahnya stabilitas sosial dan solidaritas, dan tingginya tingkat ketimpangan yang umumnya dianggap tidak adil (Todaro, 2004). Sehingga, pemekaran daerah Provinsi Jambi diharapkan dapat memajukan wilayah Jambi secara merata, kehidupan masyarakat lebih maju, sehat dan sejahtera.

Peningkatan perekonomian suatu daerah dapat dilihat berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi daerah setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah dari tahun ke tahun (Sukirno, 2010). Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan output perkapita jangka panjang yang terjadi apabila ada kecenderungan *output* perkapita naik yang bersumber dari kekuatan yang berada dalam perekonomian tersebut (Budiono, 2010). Sehingga, pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan *output* perkapita jangka panjang yang meningkat dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah nilai total output akhir yang

dihasilkan oleh perekonomian di tingkat daerah (Todaro, 2002). Perhitungan PDRB menggunakan 2 jenis harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode saat ini, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan hingga saat ini masih menggunakan tahun dasar 2010.

Nilai Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi sebelum pemekaran tahun 1996-1998 dan setelah mengalami pemekaran tahun 2017-2021 berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batanghari

Sumber: BPS Provinsi Jambi, Diolah

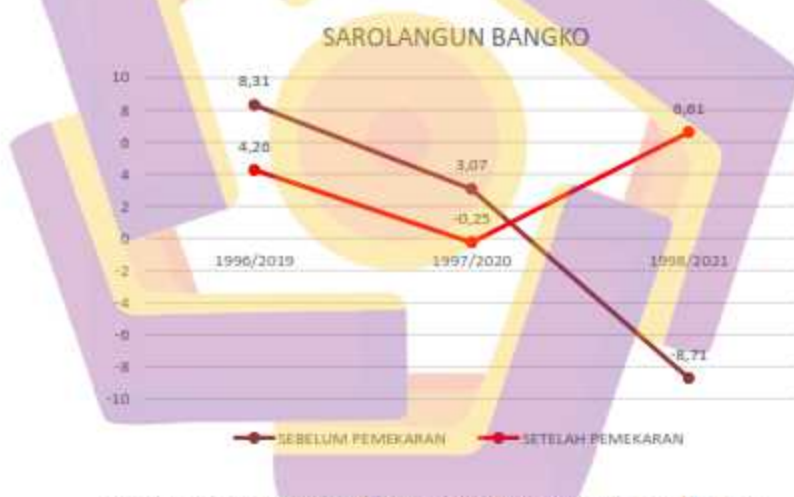
Berdasarkan gambar di atas bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batanghari sebelum pemekaran mengalami penurunan setiap

tahunnya dari 9,08 persen di tahun 1996 menjadi 6,44 persen pada tahun 1998. Setelah adanya pemekaran, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batanghari pada tahun 2019 sebesar 5,07 persen turun menjadi 4,74 persen pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan sebelum pemekaran, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batanghari mencapai angka yang lebih besar daripada setelah pemekaran. Hal ini dikarenakan oleh jumlah desa dan hasil produksi sektor unggulan yang ada pada Kabupaten Batang Hari sebelum dan setelah pemekaran mengalami penurunan.

Berdasarkan data BPS tahun 2021, jumlah desa sebelum pemekaran sebanyak 231 desa, kemudian setelah pemekaran menjadi 124 desa. Jumlah desa berkurang dan sektor unggulan yang dimiliki turut mengalami penurunan jumlah produksi. Sektor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Batang Hari sebelum pemekaran terdiri dari 13 jenis tanaman, namun setelah pemekaran menjadi 10 jenis tanaman. Jenis tanaman yang tidak ada pada Kabupaten Batang hari setelah pemekaran yaitu kapulaga, cengkeh, dan tebu. Total produksi sektor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Batang Hari sebelum pemekaran pada tahun 1996 sebesar 327.609 ton turun menjadi 254.858 ton pada tahun 1998. Total produksi sektor unggulan setelah pemekaran pada tahun 2017 sebesar 220.530 ton turun menjadi 216.635 ton pada tahun 2021.

Berkurangnya jumlah desa yang dimiliki oleh Kabupaten Batang Hari setelah pemekaran menunjukkan bahwa desa yang dimiliki sebelumnya terpecah menjadi desa baru pada daerah Kabupaten Muaro

Jambi. Hal ini mengakibatkan lahan atau wilayah yang memiliki sektor unggulan turut terbagi atau berkurang dari tahun sebelum pemekaran. Oleh karena itu, pemekaran ini memberikan dampak bagi daerah induk pemekaran dikarenakan luas lahan yang berkurang, hasil produksi sektor unggulan menurun. Sehingga, pemerintah daerah perlu melakukan tindakan dalam mendukung dan meningkatkan potensi daerah yang telah dimiliki baik bagi daerah induk pemekaran maupun daerah hasil pemekaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing.



Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarolangun Bangko

Sumber: BPS Provinsi Jambi, Diolah

Berdasarkan gambar di atas bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun Bangko sebelum pemekaran mengalami penurunan setiap tahunnya. Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten Sarolangun Bangko sebelum pemekaran tahun 1996 sebesar 8,31 persen turun menjadi

-8,71 persen pada tahun 1998. Setelah pemekaran, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun Bangko pada tahun 2019 sebesar 4,29 persen turun menjadi 5,09 persen pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan sebelum pemekaran, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun Bangko mencapai angka yang lebih besar daripada setelah pemekaran. Hal ini dikarenakan oleh jumlah desa dan hasil produksi sektor unggulan yang ada pada Kabupaten Sarolangun Bangko sebelum dan setelah pemekaran mengalami peningkatan. Jumlah desa sebelum pemekaran yaitu 109 desa, kemudian setelah pemekaran meningkat menjadi 158 desa.

Jumlah desa bertambah dan sektor unggulan yang dimiliki turut mengalami peningkatan jumlah produksi. Sektor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Sarolangun Bangko sebelum pemekaran terdiri dari 14 jenis tanaman dan setelah pemekaran menjadi 15 jenis tanaman. Jenis tanaman yang bertambah pada Kabupaten Sarolangun Bangko setelah pemekaran yaitu nilam. Total produksi sektor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Sarolangun Bangko sebelum pemekaran pada tahun 1996 sebesar 81026,1 ton meningkat menjadi 203871,15 ton pada tahun 1998. Total produksi sektor unggulan setelah pemekaran pada tahun 2017 sebesar 122.543 ton meningkat menjadi 306.482 ton pada tahun 2021.

Bertambahnya jumlah desa yang dimiliki oleh Kabupaten Sarolangun Bangko setelah pemekaran menunjukkan bahwa desa yang dimiliki sebelumnya terpecah dan terbagi, kemudian menjadi desa baru pada daerah Kabupaten Sarolangun. Hal ini mengakibatkan lahan atau

wilayah yang memiliki sektor unggulan terbagi atau berkurang dari tahun sebelum pemekaran. Oleh karena itu, pemekaran ini memberikan dampak bagi daerah induk pemekaran dikarenakan luas lahan yang berkurang akan tetapi hasil produksi sektor unggulan tetap meningkat. Sehingga, pemerintah daerah dan masyarakat sudah mampu dalam meningkatkan potensi daerah yang telah dimiliki baik bagi daerah induk pemekaran maupun daerah hasil pemekaran, tetapi masih ada yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah induk pemekaran dan daerah hasil pemekaran.



Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung
 Sumber: BPS Provinsi Jambi, Diolah

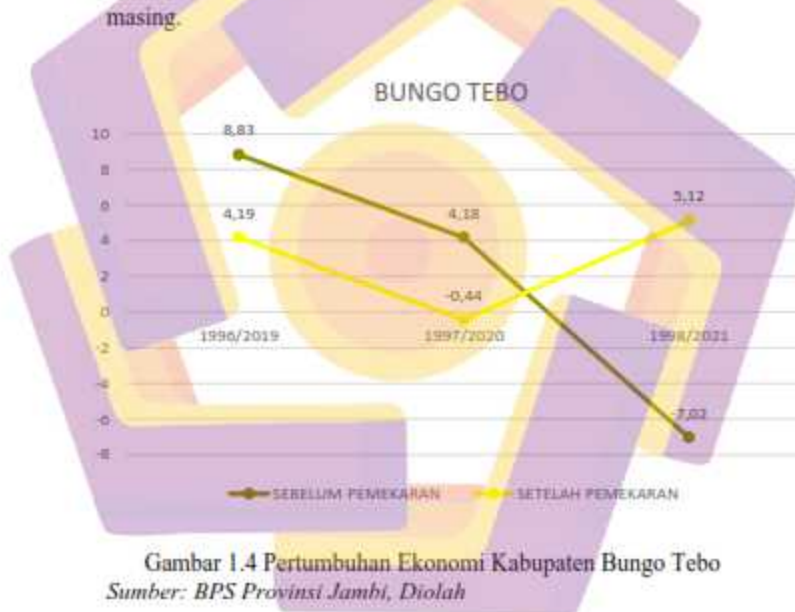
Berdasarkan gambar di atas bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung sebelum pemekaran mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten Tanjung Jabung sebelum pemekaran tahun 1996 sebesar 8,87 persen turun menjadi 6,47

persen pada tahun 1998. Setelah pemekaran, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung pada tahun 2019 sebesar 5,01 persen turun menjadi 1,36 persen pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan sebelum pemekaran, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung mencapai angka yang lebih besar daripada setelah pemekaran. Hal ini dikarenakan oleh jumlah desa dan hasil produksi sektor unggulan yang ada pada Kabupaten Tanjung Jabung sebelum dan setelah pemekaran mengalami peningkatan. Jumlah desa sebelum pemekaran yaitu 120 desa, kemudian setelah pemekaran menurun menjadi 134 desa.

Jumlah desa bertambah dan sektor unggulan yang dimiliki turut mengalami peningkatan jumlah produksi. Sektor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Tanjung Jabung sebelum pemekaran terdiri dari 8 jenis tanaman dan setelah pemekaran menjadi 7 jenis tanaman. Jenis tanaman yang tidak ada pada Kabupaten Batang hari setelah pemekaran yaitu lada. Total produksi sektor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Tanjung Jabung sebelum pemekaran pada tahun 1996 sebesar 193033,6 ton meningkat menjadi 306.660 ton pada tahun 1998. Total produksi sektor unggulan setelah pemekaran pada tahun 2017 sebesar 180.333 ton turun menjadi 179.909 ton pada tahun 2021.

Bertambahnya jumlah desa yang dimiliki oleh Kabupaten Tanjung Jabung setelah pemekaran menunjukkan bahwa desa yang dimiliki sebelumnya terpecah menjadi desa baru pada daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini mengakibatkan lahan atau wilayah yang memiliki

sektor unggulan terbagi atau berkurang dari tahun sebelum pemekaran. Oleh karena itu, pemekaran ini memberikan dampak bagi daerah induk pemekaran dikarenakan luas lahan yang berkurang, hasil produksi sektor unggulan setelah pemekaran menurun. Sehingga, pemerintah daerah perlu melakukan tindakan dalam mendukung dan meningkatkan potensi daerah yang telah dimiliki baik bagi daerah induk pemekaran maupun daerah hasil pemekaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing.



Gambar 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo Tebo
 Sumber: BPS Provinsi Jambi, Diolah

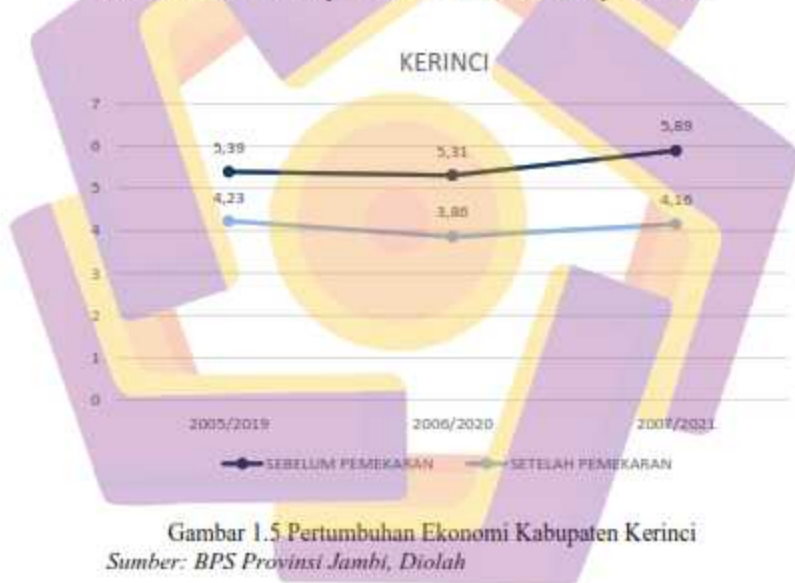
Berdasarkan gambar di atas bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo Tebo sebelum pemekaran mengalami penurunan setiap tahunnya. Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten Bungo Tebo sebelum pemekaran tahun 1996 sebesar 8,83 persen turun menjadi -7,02 persen pada tahun 1998. Setelah pemekaran, pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Bungo Tebo pada tahun 2019 sebesar 4,19 persen turun menjadi 5,12 persen pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan setelah pemekaran, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo Tebo mencapai angka yang lebih besar daripada sebelum pemekaran. Hal ini dikarenakan oleh jumlah desa dan hasil produksi sektor unggulan yang ada pada Kabupaten Bungo Tebo sebelum dan setelah pemekaran mengalami peningkatan. Jumlah desa sebelum pemekaran yaitu 62 desa, kemudian setelah pemekaran menurun menjadi 112 desa.

Jumlah desa berkurang dan sektor unggulan yang dimiliki turut mengalami penurunan jumlah produksi. Sektor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Bungo Tebo sebelum pemekaran terdiri dari 12 jenis tanaman dan setelah pemekaran menjadi 9 jenis tanaman. Jenis tanaman yang tidak ada pada Kabupaten Batang hari setelah pemekaran yaitu kapuk, cengkeh, dan aren. Total produksi sektor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Bungo Tebo sebelum pemekaran pada tahun 1996 sebesar 91.118 ton meningkat menjadi 184190,2 ton pada tahun 1998. Total produksi sektor unggulan setelah pemekaran pada tahun 2017 sebesar 150.774 ton meningkat menjadi 156.204 ton pada tahun 2021.

Bertambahnya jumlah desa yang dimiliki oleh Kabupaten Bungo Tebo setelah pemekaran menunjukkan bahwa desa yang dimiliki sebelumnya terpecah dan terbagi, kemudian menjadi desa baru pada daerah Kabupaten Tebo. Hal ini mengakibatkan lahan atau wilayah yang memiliki sektor unggulan turut terbagi atau berkurang dari tahun sebelum

pemekaran. Oleh karena itu, pemekaran ini memberikan dampak bagi daerah induk pemekaran dikarenakan luas lahan yang berkurang akan tetapi hasil produksi sektor unggulan tetap meningkat. Sehingga, pemerintah daerah dan masyarakat sudah mampu dalam meningkatkan potensi daerah yang telah dimiliki baik bagi daerah induk pemekaran maupun daerah hasil pemekaran, tetapi masih ada yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah induk pemekaran dan daerah hasil pemekaran.



Gambar 1.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kerinci
 Sumber: BPS Provinsi Jambi, Diolah

Berdasarkan gambar di atas bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci sebelum pemekaran mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten Kerinci sebelum pemekaran tahun 2005 sebesar 5,39 persen meningkat menjadi 5,89 persen pada tahun 2007. Setelah pemekaran, pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Kerinci pada tahun 2019 sebesar 4,23 persen turun menjadi 4,16 persen pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan sebelum pemekaran, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci mencapai angka yang lebih besar daripada setelah pemekaran. Hal ini dikarenakan oleh jumlah desa dan hasil produksi sektor unggulan yang ada pada Kabupaten Kerinci sebelum dan setelah pemekaran mengalami fluktuasi. Jumlah desa sebelum pemekaran yaitu 252 desa, kemudian setelah pemekaran menurun menjadi 287 desa.

Jumlah desa bertambah dan sektor unggulan yang dimiliki turut mengalami penurunan jumlah produksi. Sektor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Kerinci sebelum pemekaran terdiri dari 13 jenis tanaman dan setelah pemekaran menjadi 16 jenis tanaman. Jenis tanaman yang bertambah pada Kabupaten Batang hari setelah pemekaran yaitu kapuk, aren dan nilam. Total produksi sektor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Kerinci sebelum pemekaran pada tahun 2005 sebesar 106.143 ton turun menjadi 96262,38 ton pada tahun 2007. Total produksi sektor unggulan setelah pemekaran pada tahun 2017 sebesar 292.410 ton turun menjadi 21.364 ton pada tahun 2021.

Bertambahnya jumlah desa yang dimiliki oleh Kabupaten Kerinci setelah pemekaran menunjukkan bahwa desa yang dimiliki sebelumnya terpecah dan terbagi, lalu menjadi desa baru pada daerah Kota Sungai Penuh. Hal ini mengakibatkan lahan atau wilayah yang memiliki sektor unggulan turut terbagi atau berkurang dari tahun sebelum pemekaran. Oleh

karena itu, pemekaran ini memberikan dampak bagi daerah induk pemekaran dikarenakan luas lahan yang berkurang. Hasil produksi sektor unggulan menurun. Sehingga, pemerintah daerah perlu melakukan tindakan dalam mendukung dan meningkatkan potensi daerah yang telah dimiliki baik bagi daerah induk maupun daerah hasil pemekaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah bonus demografi. Bonus demografi memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memacu pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan jumlah penduduk merupakan salah satu faktor dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi (Smith, 2012). Bonus demografi adalah periode di mana terjadi manfaat ekonomi karena menurunnya rasio ketergantungan penduduk akibat tingkat kelahiran yang rendah dalam jangka waktu yang lama (Wongboonsin, 2003).

Bonus Demografi merupakan kondisi demografi yang menguntungkan karena sebagian besar penduduknya terdiri dari penduduk yang masih dalam usia kerja (Sembiring, 2014). Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saumana *et al* (2021), Destu & Suprijati (2021), dan Permatasari & Himmati (2022) membuktikan bahwa Bonus Demografi berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Bonus Demografi yang tinggi memberikan pengaruh terhadap jumlah pengangguran yang semakin meningkat. Data persentase Bonus

Demografi pada daerah induk pemekaran di Provinsi Jambi tahun 2017-2021 sebagai berikut:



Gambar 1.6 Grafik Bonus Demografi

Sumber: BPS Provinsi Jambi, Diolah

Berdasarkan grafik di atas, bonus demografi atau jumlah penduduk usia kerja pada daerah induk pemekaran mengalami penurunan setiap tahunnya. Bonus demografi tertinggi adalah Kabupaten Sarolangun Bangko pada tahun 2017 sebesar 47,82 persen turun menjadi 47,37 persen pada tahun 2021, sedangkan bonus demografi terendah terjadi di Kabupaten Kerinci pada tahun 2017 sebesar 43,79 persen naik menjadi 44,49 persen pada tahun 2021. Penurunan persentase bonus demografi yang terjadi setiap tahunnya menunjukkan bahwa semakin rendah pula tingkat pengangguran pada daerah tersebut.

Selanjutnya Pertumbuhan Ekonomi dapat dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia. Pembangunan manusia adalah salah satu tanda keberhasilan kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi yang tinggi dapat

tercapai apabila sumber daya yang dimiliki negara mampu bersaing dalam skala global (Kuncoro, 2009). Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran kinerja pembangunan manusia didasarkan pada komponen fundamental tertentu dari kualitas hidup (Feriyanto, 2014). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saumana *et al* (2021) dan Destu & Suprijati (2021) membuktikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Data Indeks Pembangunan Manusia pada daerah induk pemekaran di Provinsi Jambi tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 1.7 Grafik Indeks Pembangunan Manusia

Sumber: BPS Provinsi Jambi, Diolah

Berdasarkan grafik di atas, bahwa Indeks Pembangunan Manusia pada daerah induk mengalami peningkatan setiap tahunnya. Indeks Pembangunan Manusia tertinggi yaitu Kabupaten Kerinci pada tahun 2017 sebesar 70,03 persen naik menjadi 71,45 persen tahun 2021. Sedangkan nilai Indeks Pembangunan Manusia terendah yaitu Tanjung Jabung pada

tahun 2017 sebesar 66,15 persen naik menjadi 68,16 persen pada tahun 2021. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia setiap tahunnya ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas menggambarkan peningkatan produksi barang dan jasa.

Selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka. Pengangguran didefinisikan sebagai individu yang termasuk dalam angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang ditentukan, namun tidak berhasil mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Kehadiran pengangguran di suatu daerah adalah masalah yang melibatkan tidak hanya sektor ekonomi, tetapi juga memiliki kaitan dengan bidang sosial dan pendidikan (Sukirno, 2008). Tingkat pengangguran terbuka adalah jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja merujuk pada penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau sementara tidak bekerja.

Pengangguran sendiri dapat dibagi menjadi empat jenis yaitu orang yang sedang mencari pekerjaan, orang yang sedang mempersiapkan pekerjaan baru atau usaha, orang yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, orang yang memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (Ardian *et al*, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Permatasari & Himmati (2022) membuktikan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur. Adapun Tingkat Pengangguran

Terbuka pada daerah induk pemekaran di Provinsi Jambi tahun 2017-2021 ialah sebagai berikut:



Gambar 1.8 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber: BPS Provinsi Jambi, Diolah

Berdasarkan gambar di atas, bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka peningkatan dan penurunan yang signifikan. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi yaitu Kabupaten Bungo Tebo pada tahun 2017 sebesar 4,89 persen naik menjadi 5,86 persen pada tahun 2021. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka terendah terjadi pada Kabupaten Kerinci pada tahun 2017 sebesar 3,26 persen turun menjadi 2,32 persen pada tahun 2021. Penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka setiap tahunnya menunjukkan bahwa jumlah pengangguran daerah semakin mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang telah ada dimanfaatkan dengan baik, sehingga memberikan dampak yang

positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta mengurangi jumlah pengangguran.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka objek penelitian ini adalah Daerah Induk Pemekaran di Provinsi Jambi. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Pemerintah maupun masyarakat dalam meningkatkan atau mempertahankan kestabilan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Induk Pemekaran di Provinsi Jambi. Sehingga, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Daerah Induk Pemekaran di Provinsi Jambi.

1.2 Rumusan Masalah

Pemekaran daerah merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan kesatuan wilayah administratif baru ditingkat provinsi, kabupaten, dan kota hasil pemekaran dari kabupaten induknya. Tujuan dilakukannya pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan memberikan dampak melemahnya stabilitas sosial, solidaritas, dan terjadinya inefisiensi ekonomi. Pemekaran daerah di Provinsi Jambi memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah induk pemekaran. Sebelum adanya pemekaran daerah, pertumbuhan ekonomi daerah induk di Provinsi Jambi mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun demikian setelah adanya pemekaran daerah,

pertumbuhan ekonomi daerah induk pemekaran di Provinsi Jambi tidak mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi daerah induk pemekaran Provinsi Jambi dipengaruhi oleh variabel Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Sehingga, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Bonus Demografi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Induk Pemekaran di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Induk Pemekaran di Provinsi Jambi?
3. Bagaimana Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Induk Pemekaran di Provinsi Jambi?
4. Bagaimana Pengaruh Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Induk Pemekaran di Provinsi Jambi?
5. Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi Daerah Induk Provinsi Jambi Sebelum dan Setelah Pemekaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Bonus Demografi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Induk Pemekaran di Provinsi Jambi. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh bonus demografi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah induk pemekaran di Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi daerah induk pemekaran di Provinsi Jambi.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi daerah induk pemekaran di Provinsi Jambi.
4. Untuk mengetahui pengaruh bonus demografi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi daerah induk pemekaran di Provinsi Jambi.
5. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi daerah induk Provinsi Jambi sebelum dan setelah pemekaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pemerintah, akademik, dan peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai analisis determinan pertumbuhan ekonomi daerah induk pemekaran di Provinsi Jambi. Sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis untuk penelitian selanjutnya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan sebagai alat dan pedoman bagi pemerintah daerah khususnya Provinsi Jambi dalam menyusun kebijakan, rencana dan strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui bonus demografi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan menambah referensi kepada para akademisi Universitas Amikom Yogyakarta yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama yaitu analisis determinan pertumbuhan ekonomi.

4. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian lebih mendalam terkait Pertumbuhan Ekonomi, Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan mengambil fokus penelitian di wilayah atau provinsi lain.

1.5 Sistematika Bab

Sistematika penulisan merupakan gambaran umum mengenai isi dari keseluruhan pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pembahasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Menjelaskan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika bab penulisan mengenai Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Induk Pemekaran di Provinsi Jambi.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tentang teori-teori variabel yang digunakan serta dikemukakan oleh para ahli maupun teori yang mendukung dan memperkuat penelitian ini. Selain itu, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, kerangka berfikir, dan hipotesis atau dugaan sementara hasil penelitian.

3. BAB III Metode Penelitian

Pada bab tiga ini menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan pengumpulan data dan pengolahan data. Berisi penjelasan mengenai

objek penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data yang digunakan.

4. BAB IV Hasil Analisis dan Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil analisis data sesuai dengan alat dan teknik analisis yang digunakan. Memberikan pembahasan terhadap hasil analisis sesuai dengan teknik analisis yang digunakan, serta argumentasi atau dasar pbenarannya.

5. BAB V Penutup

Bab ini adalah bab terakhir, bab yang menampilkan secara singkat kesimpulan serta saran yang diperoleh dari pembahasan.

